

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### **A.) Latar Belakang Masalah**

Salafi merupakan salah satu cabang gerakan keagamaan Islam. Salafi muncul dikawasan pedalaman semenanjung arab tepatnya di wilayah Najd pada abad ke 18 oleh seorang teolog Muslim bernama Muhammad bin Abdul Wahab. Muahammad bin Abdul Wahab memiliki latar beakang keluarga yang berasal dari pemuka agama terpendang di kota Al Uyaynah di kawasan Najd pedalaman semenanjung arab. Dari pendidikan Agama Islam yang dpelajari oleh Abdul Wahab meliputi dari ilmu Hadist, Tafsir Alquran, Fiqih hingga sejumlah pemikir Islam klasik, membentuk pandangan Muhammad bin Abdul Wahab akan pentingnya konsep keesaan Allah (*tawhid*). Dalam pandangan Abdul Wahab bahwa agama Islam itu telah sempurna semenjak Nabi Muhammad SAW selesai melaksanakan tugasnya mendakwahkan Islam sehingga Islam tidak perlu melakukan percampuran dengan berbagi macam ritual atau adat, sehingga fokus dari gerakan salafi adalah pemurnian aqidah Islam yang berlandaskan pada tawhid (keesaan Allah). Muhammad bin Abdul Wahab hidup di tengah kawasan padang pasir yang dihuni oleh mayoritas Suku Badui Arab yang hidupnya cukup keras dan dalam dakwahnya kerap bertentnaganan dengan situasi kondisi keagamaan di tempat tinggalnya Al Uyaynah dan kerap menyerang otoritas Kerajaan Turki Usmani yang telah dianggapnya telah menyimpang dari prinsip Islam dan

melakukan banyak hal bid'ah. Muhammad bin Abdul Wahab banyak dipengaruhi oleh tulisan karya dari cendekiawan Muslim klasik yaitu Taqiyudin bin Taymiya yang membagi konsep tawhid keesaan ketuhanan dimana hanya Allah yang mempunyai kekuasaan prerogatif dalam penciptaan alam semesta, serta keesatuan dalam penyembahan, dimana hanya Allah sebagai object tunggal yang harus disembah dan dipatuhi<sup>1</sup> Disamping itu Ibnu Taymiya secara tegas pentingnya mengimplementasi Al Quran dan Hadist sebagai landasan hidup umat Islam, dan

kritiknya terhadap berbagai macam pemikiran pemikiran dari cendekiawan muslim klasik serta gagasannya atas pentingnya beberapa elemen yang terdapat dalam Islam, antara lain :

- a.) Pentingnya Hadist sebagai landasan moral pengambilan keputusan yang berkenan dengan kemaslahatan umat.
- b.) Memusatkan pada pentingnya pemebelajan mengenai Hadist dan rantai penyampaiannya.
- c.) Mengkritisi interpretasi dan imitasi buta terhadap berbagai pemikiran dari Cendekiawan Islam klasik.
- d.) Membangun interpretasi yang tepat dalam mengajarkan makna Al Quran dan Hadist

---

<sup>1</sup> Domitilla Sagramoso, "The Radicalisation of Islamic Salafi Jamaats in the North Caucasus: Movin Closer to Global Jihadist Movement ?", *Europa Asia Studies*, 64:3 2012, hal 5

e.) Pentingnya perubahan etika sosial dan keagamaan dalam pentingya dalam mengajarkan Al Quran dan Hadist.

Disamping itu hal utama yang paling disorot oleh Muhammad bin Abdul Wahab adalah segala hal bid'ah dan degradasi moral yang telah melekat pada umat Islam seperti penyembahan berhala, pengkultusan terhadap orang yang dianggap suci,serta bentuk pemikiran dan jalan hidup yang dianggapnya tidak sesuai dengan prinsip Islam.

Pada masa Awal dakwah Muhammad bin Abdul Wahab, dapat dikatakan masyarakat Al Uyaynah digolongkan telah menyimpang dari prinip *tawhid*. Ziarah makam untuk meminta berkat, serta pengkultusan situs yang dianggap suci telah mencederai konsep *tawhid*. Karena ketidaksesuaian dengan kultur dan kondisi keagamaan masyarakat sekitar , otoritas keagamaan di wilayah tersebut mulai memandang dakwah Abdul Wahab sebagai ancaman, hal ini mengharuskan Muhammad melakukan perjalanan keluar kota, dimana setelah melakukan Ibadah Haji di Mekkah Abdul Wahab memperdalam pengetahuannya ke Madinah dimana beliau berguru dengan cendekiawan Syekh Abdullah bin Ibrahim bin Syaif dan Muhammad Hayat Al Sindi. Kedua cendekaiwan terssebut banyak berpengaruh terhadap pandangan keagamaan Abdul Wahab. Setelah selesai dalam mendalami ajaran Islam Muhammad bin Abdul Wahab melanjutkan perjalanan ke Huraymila dimana disana beliau menulis sebuah buku yang merupakan refleksi atas pandangannya tentang konsep *tawhid*. Selama berada di Huraymila Abdul

Wahab melakukan dakwah yang dimana otoritas politik dan keagamaan diwilayah tersebut merasa terancam dengan dakwahnya. Dengan penolakan dari masyarakat Huraymila Muhammad bin Abdul Wahab kembali ke kampung halamannya di Al Uyaynah. Sekembalinya ke Al Uyaynah Abdul Wahab melakukan kontrak politik dengan penguasa lokal Uthman bin Hammid bin Muammar yang secara terbuka menerima Ajaran Abdul Wahab dan memberikan perlindungan politik bagi Abdul Wahab untuk mendakwahkan ajarannya serta Ibnu Muammar mendapat legitimasi dan dukungan dari Abdul Wahab untuk melebarkan kekuasaannya keseluruh wilayah Najd.

Kontrak Politiknya dengan Ibnu Muammar dapat dikatakan sebagai lompatan besar dalam yang menghantarkan Abdul Wahab dalam menancapkan kekuasaan politik keagamaannya pengaruhnya di Jazirah Arab. Hal ini dibuktikan dengan mudahnya Abdul Wahab mendakwahkan ajarannya serta proses pembersihan kegiatan kegiatan bid'ah yang marak di kawasan tersebut yang paling populer adalah penghancuran makam Zayd bin Khattab yang merupakan saudara kandung Umar bin Khattab yang makamnya banyak dikunjungi peziarah untuk meminta berkat. Namun berkat ulah dakwah Abdul Wahab yang mulai menarik banyak pengikut serta dinilai otoritas politik dan keagamaan mulai meresahkan, Ibnu Muammar mengirim Abdul Wahab ke Diriyah. Disinilah Abdul Wahab menjalin kontrak politik dengan Muhammad bin Saud penguasa lokal di kota tersebut. Koalisinya dengan Muhammad bin Saud merupakan cikal bakal berdirinya negara Arab Saudi modern. Koalisinya dengan Muhammad bin Saud dapat dikatakan merupakan sebuah kesuksesan besar, dimana dalam koalisinya terbentuklah otoritas politik

yang di pimpin oleh Muhammad bin Saud yang mendapatkan legitimasi religius dari Muhammad bin Abdul Wahab. Aliansi militer, politik, dan agama berhasil menaklukan hampir seluruh Jazirah Arab dibawah kekuasaan Keluarga Saud dalam waktu kurang lebih satu abad.

Abdul Aziz bin Abdul Rahman bin Faisal Al Saud, sang pendiri negara Arab Saudi modern dalam perjuangannya membangun kekuatan politiknya, membentuk sebuah institusi yang merupakan hasil aliansi dan pengaruh ketal paham Wahabi. Untuk menjamin supremasi dan penanaman faham Salafi di masyarakat Jazirah Arab, Ibnu Saud membentuk *mutawa'a* (polisi agama). Mutawa'a terdiri dari berbagai orang yang memiliki pemahaman agama yang cukup baik dan loyal terhadap ideologi Salafi Wahabi tugas lembaga ini sebagai lembaga pengawas dan mendisiplinkan individu atau kelompok yang tidak menjalankan Syariat Islam. Dalam upayanya memperluas kekuasaan keseluruhan Jazirah Arab Ibnu Saud mendirikan *ikhwan* (persaudaraan) sebuah lembaga militer yang memiliki ideologi Salafi Wahabi yang memiliki tugas melakukan operasi militer. Melalui dua institusi memiliki peran utama yaitu membantu koalisi Ibnu Saud – Wahabi dalam menyatukan seluruh suku di jazirah Arab.<sup>2</sup> Satu hal yang perlu diketahui bahwa pada masa abad ke 18 hingga 19 banyak bermunculan tokoh cendekiawan muslim yang mengusung gerakan pembaharu Islam. Gerakan pembaharu Islam yang muncul memiliki karakteristik yang merupakan refleksi dari lingkungan dimana gerakan itu muncul dan juga sebagai respon atas kemunduran peradaban Islam

---

<sup>2</sup>Jon Amarjani, *Modern Isamist Movement History, Religion, And Politics* (A John Wiley & Sons, Ltd., Publication 2012) hal 140-147

dan faktor kolonisasi negara barat di di dunia Islam<sup>3</sup>

Perkembangan gerakan Salafi mencapai kemajuan yang pesat pasca runtuhnya kerajaan Turki Usmani setelah kekalahannya pada Perang Dunia I. Kolaborasi antara Keluarga Saud sebagai penguasa politik dikawasan tersebut dengan pihak dari keluarga Muhammad bin Abdul Wahab berhasil mengusir otoritas Turki Usmani dari Jazirah Arab sehingga pada didirikanlah negara Arab Saudi pada tahun 1932 menjadikan otoritas Ulama Salafi sebagai legitimasinya. Perkembangan salafi semakin signifikan pasca Perang Dunia II selesai, Arab Saudi yang menjadi negara kaya akan minyak menjadikan kekuatannya untuk membangun dan menyebarkan pengaruh Salafi ke seluruh negara di dunia Islam. Mulai dari pendanaan pendirian masjid, kegiatan sosial, hingga pendidikan. Pada masa era perang dingin Salafi menjadikan ideologi yang dianut dua negara super power, Demokrasi Liberal dan Komunis sebagai musuh utama dan banyak negara di timur tengah seperti Mesir, dan Suriah memiliki hubungan yang tidak harmonis dengan Kerajaan Arab Saudi. Bahkan Arab Saudi bersedia menampung kelompok Ikhwanul Muslimin Mesir karena berbagi musuh yang sama, yaitu rezim Gamal Abdul Naseer yang mengusung Pan Arabisme yang Sosialis. Dalam perkembangannya Gerakan Salafi mulai tidak selalu identik dengan Salafi Wahabi ala Arab Saudi. Fahaman Salafi telah menyebar keseluruh domain muslim khususnya di wilayah Timur Tengah. Gerakan Salafi secara perlahan mengalami sebuah transformasi sebagai dampak dari absennya kekuatan Islam dalam perpolitikan global. Eqbal Ahmad seorang cendekiwan muslim memaparkan

---

<sup>3</sup>Natana J. Delong Bas, Wahhabi Islam, From Revival and Reform to Global Jihad (Oxford University Press, USA 2014) hal 8

bahwa, untuk memahami radikalisme Salafi adalah sebagai akibat dari prinsip Islam yang telah mengalami distorsi dan penyimpangan, inilah yang menjadi landasan moral gerakan Salafi melegitimasi kekerasan dengan payung Jihad ofensif. Penggunaan Jihad Ofensif sebagai bentuk meraih tujuan politik yang berlandaskan nilai agama Islam. Dalam mengusung misi suci yaitu mengembalikan supremasi Islam dalam kehidupan politik maka Salafi yang ideologinya telah menyebar keseluruh dunia Islam secara otomatis telah membentuk lingkaran jihad yang berlandaskan solidaritas Islam, hal inilah yang memiliki dampak transnasional.<sup>4</sup>

Pada akhir tahun 1979 pemerintahan Arab Saudi diguncang oleh gelombang protes yang dipimpin oleh Juhayman Al Utaybi yang menyerukan berbagai keluhannya terhadap rezim yang berkuasa tersebut dengan penolakan sistem monarki yang tidak sesuai dengan Islam karena pemimpin yang mempunyai legitimasi adalah pemimpin yang di pilih umat Islam, serta keinginannya untuk menjatuhkan rezim keluarga Saud yang dinilai telah menyelewengkan penggunaan kekayaan negara, dan segala hubungan dengan negara negara barat harus segera diakhiri untuk melepas ketergantungan terhadap negara barat. Sebagai respon, selain menangkap Juhayman Al Utaybi pemerintah Arab Saudi mulai membangun ulang kebijakan dalam negeri yang lebih represif diantara penerapan hukum Islam yang lebih represif bahkan diantaranya ada bersifat misogyni. Untuk memperkuat legitimasi sebagai negara Islam, pemerintah Arab Saudi mengundang para ulama dan cendekiawan Muslim untuk mengajar di

---

<sup>4</sup>Bilveer Singh, *The Talibanization of Southeast Asia, losing the war on terror to Islamist extremists* (Greenwood Publishing Group, 2007) hal 15

berbagai universitas di Arab Saudi. Hal penting yang perlu diketahui bahwa sejumlah cendekiawan dan ulama tersebut banyak yang menyerukan kritiknya kepada pemerintah Arab Saudi, salah satu contohnya adalah Abdullah Azzam, mentor dari Osama bin Laden yang mempunyai pengaruh kuat dalam membentuk pandangan anti Saudi dan anti baratnya, sehingga dari kebijakan tersebut membawa sebuah dampak yang secara tidak langsung telah membangkitkan sejumlah generasi muda membentuk gerakan Islam pembaharu.<sup>5</sup>

Pada era 80an merupakan babak baru dalam perkembangan Salafi dimana gerakan Salafi mulai mengobarkan Jihad bersenjata. Pada masa ini muncul seorang tokoh penting Osama bin Laden yang mengadopsi faham salafi yang kelak menjadi ideologi Al Qaeda menjalin kerjasama dengan Taliban (yang berasal dari Madaris Deobandi) pimpinan Mullah Omar dan mendeklarasikan Jihad melawan Uni Soviet, dan perlu diketahui bahwa Arab Saudi dan Amerika Serikat secara tidak langsung menyupport jihad tersebut pada saat itu. Dengan adanya jihad melawan Uni Soviet Osama bin Laden dengan menjalin aliansi dengan Taliban yang telah terdidik faham Salafi secara ketat menjadikan Afghanistan sebagai pusat gerakan jihad internasional. Setelah berhasil mengusir Uni Soviet dari Afgahnistan. Pada masa perang teluk kedua, Arab Saudi menjadikan negara koalisi barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat membendung invasi Iraq rezim Saddam Husein ke wilayah Kuwait, hal ini menimbulkan awal permusuhan gerakan Salafi Jihadis yang didominasi oleh Al Qaeda pimpinan Osama dengan rezim Arab Saudi dan khususnya dengan negara negara barat terutama Amerika Seikat yang dianggap

---

<sup>5</sup> Jon Armajani, *Modern Islamist Movements History, Religion, and Politics*-(A John Wiley & Sons, Ltd., Publication 2012) hal 136-137

telah menjajah negara negara Islam. Sejak era perang dingin usai gerakan salafi baik yang non jihadis dan jihadis banyak bermunculan khususnya diwilayah Kaukasus, banyaknya negara eks Uni Soviet yang ingin melepaskan diri dari orbit Rusia menyebabkan krisis politik diwilayah Kaukasus yang menyebabkan suburnya gerakan revolusi di wilayah Kaukasus yang berideologi salafi.

Masuk pada awal abad 21 dunia di kagetkan dengan peristiwa 9/11 ketika sebuah pesawat komersil menabrak gedung kembar WTC dan kelompok Al Qaeda dianggap telah bertanggung jawab atas peristiwa tersebut . Sejak terjadinya tragedi tersebut Amerika menerapkan kebijakan Global War on Terror terhadap kelompok Islam radikal. Pemerintah Amerika Serikat dituntut bertindak cepat untuk membendung segala bentuk terorisme. Sejak saat itu Amerika serikat beserta negara barat sekutunya menginvasi negara negara Islam yang dinyatakan sebagai sarang teroris seperti Afghanistan dan Iraq. Kebijakan pemerintahan Presiden George W Bush yang repressif tersebut berhasil menyuburkan gerakan gerakan Salafi Jihadis di Kawasan Timur Tengah, di Iraq setelah Amerika menginvasi negara tersebut keamanan dinegara tersebut justru semakin terancam, perselisihan antar sektarian yang tajam tidak berhasil diredam serta perang berkepanjangan negara negara barat di Taliban yang menguasai lembah Swat Afghanistan yang tidak kunjung selesai.

Gejolak yang terjadi di sejumlah negara Arab atau yang biasa disebut Arab Spring bisa dikatakan momen yang tepat bagi sejumlah gerakan Islam revivalis untuk menjatuhkan penguasa negara arab yang diktator yang dianggap *thogut*. Di Mesir Ikhwanul Muslimin yang berhasil menumbangkan Presiden Husni Mubarak,

digantikan Muhammad Mursi walaupun digulingkan kembali oleh militer, namun situasi di Suriah cukup berbeda, dimana demo warga yang ingin menuntut turunya Presiden Bashar Al Assad berubah menjadi perang saudara. Pihak oposisi yang terdiri dari banyak faksi memiliki bentuk tujuan dan cita cita yang berbeda, salah satunya Jabhat Al Nusra yang berafiliasi dengan Al Qaeda pimpinan Ayman Az Zawaihiri dan memiliki misi mendirikan khalifah Islam di Suriah. Dengan menyebarkan isu sektarian pihak oposisi dinilai berhasil dalam mengajak umat Islam di seluruh dunia untuk berjihad di Suriah melawan rezim Bashar Al Assad yang merupakan Syiah dan dianggap sesat oleh golongan Salafi. Hingga saat ini peran gerakan jihad Salafi masih memiliki kekuatan yang signifikan dalam peranya menyebarkan pengaruh diwilayah timur tengah, hal itu tidak lepas dari peran Arab Saudi sebagai pusat Salafi dan sponsor baik secara langsung dan tidak langsung.

## **B.) Rumusan masalah**

Salafi berawal dari sebuah gerakan keagamaan yang muncul pada abad 18. dengan seiringnya kemunduran Islam dari segi politik, gerakan Salafi secara perlahan mulai memiliki agenda politik yang menjadikan nilai Islam sebagai ideologinya serta premis atas pemurnian Islam dan umat Muslim yang telah mengalami distorsi oleh pemikiran barat. Dengan absennya nilai Islam dan lingkungan sosial politik di Timur tengah gerakan Salafi mulai mengusung gerakan Jihad ofensif, sehingga menimbulkan sebuah pertanyaan bagaimana

dinamika gerakan Salafi Jihadist dalam membangun rezim politik Islam di Timur Tengah.

### **C.) Kerangka Pemikiran**

#### Transnational Social Movement Concept

Dalam memahami transformasi gerakan Salafi Jihadis, yang berawal dari sekedar gerakan keagamaan hingga berubah menjadi gerakan keagamaan yang memiliki tujuan politik untuk membangun kekuatan politik Islam khususnya di wilayah Timur Tengah maka penulis menggunakan konsep Transnational Social Movement mengingat gerakan Salafi telah memiliki jaringan lintas batas antar negara yang disatukan oleh ideologi, struktur, dan pola kerja mereka.

Transnasionalisme adalah sebuah konsep yang menggambarkan sebuah hubungan antar sosial dan kebudayaan. Transnasionalisme sendiri merupakan sebuah gerakan sosial yang dimana kemunculannya merupakan dampak dari globalisasi dan kemajuan teknologi yang mendukung kemudahan interaksi antar entitas. Globalisasi memiliki peran penting dalam akselerasinya gerakan transnasional yang menekankan pada integrasi dunia dan mengeliminasi batas nasional. Menurut Thomas L. Friedman, globalisasi memiliki tiga landasan keseimbangan: (1) keseimbangan tradisional yang menandai hubungan antar bangsa (nation state); (2) keseimbangan antara suatu bangsa/negara dengan pasar ekonomi dunia (global market); dan (3) keseimbangan antara individu dan negara (individual and the

nation state). Apabila landasan pertama menitikberatkan kepada peran negara, landasan kedua lebih menonjolkan peran pasar di dalam menentukan kejadian-kejadian yang ada di dunia. Super power dan supermarket mendominasi kedua landasan ini. Sementara itu, keseimbangan ketiga muncul ketika batas negara telah runtuh dan dunia telah dihubungkan satu dengan lainnya dengan sebuah jaringan yang sangat luas. Hal ini memungkinkan bagi perorangan/individu untuk tampil di panggung dunia tanpa perantara negara dan mampu mempengaruhi pasar maupun keberadaan sebuah negara. Pada tingkatan inilah muncul apa yang dinamakan dengan super-empowered individual yang mana individu-individu ini dapat berbuat apa saja di panggung dunia, baik ataupun buruk, yang dapat merepotkan dunia<sup>6</sup>. Seiring dengan meningkatnya aktivitas gerakan sosial transnasional telah mengubah gambaran tentang politik global, dimana aktor negara tidak lagi menjadi pemain utama. Hal ini berimplikasi terhadap hubungan *state actor* dan *non state actor* yang direpresentasikan oleh gerakan transnasional, dimana gerakan transnasional berpotensi sebagai oposisi dari kebijakan politik sebuah negara.

Pola umum munculnya sebuah gerakan transnasional biasanya diawali oleh sebuah kumpulan individu di sejumlah negara yang memiliki bentuk kurang formal dalam aktivasnya namun memiliki kesamaan tujuan dan ideologi. Namun disamping kesamaan tujuan dan ideologi, kedua hal tersebut dinilai kurang maksimal dalam memobilisasi setiap individu untuk terlibat dalam kegiatan gerakan transnasional tersebut, paling tidak ada sebuah internasionalisasi sebuah isu atau fenomena tertentu disertai dengan anggapan dalam memandangnya. Menurut Della Porta dan Sydney Tarrow, konsep *transnational collective action*

---

<sup>6</sup>Dikutip dari <http://pikirangga.blogspot.com/2012/02/transnasional-isme.html>

merupakan gerakan keadilan global, yang aktivitasnya melibatkan jaringan kerja internasional dalam menghadapi aktor internasional atau aktor negara. Proses dari transnasionalisasi sebuah gerakan sosial meliputi *difusion*, *externalization*, *domestication*. *Difusion* merupakan tahap awal dalam transnasionalisasi sebuah gerakan yang berhubungan dengan penyebaran sebuah ide, kepercayaan dan rumusan masalah sebagai taktik yang harus diadopsi dalam menghadapi sebuah situasi dan isu yang sedang berkembang. *Externalization* adalah tahap dalam membingkai sebuah isu secara global agar diterima oleh masyarakat global secara luas. Menurut Margaret Keck dan Kathryn Sikkink, dalam pembedaan isu secara global bertujuan untuk memandang sebuah isu yang berkembang secara hitam dan putih, benar atau salah serta isu yang sedang berkembang bukanlah kejadian semata mata tidak disengaja tetapi disertai latar belakang yang mematikanya dan siapa yang harus bertanggung jawab. *Domestication*, dalam tahap ini, keberadaan dari target vertikal yang biasanya direpresentasikan oleh aktor negara, dapat meningkatkan jaringan aktivis lintas negara.<sup>7</sup> Dimana aktor lokal dapat merespon sebuah isu global dan isu lokal dapat didengar secara global. Hal inilah yang memberi dampak signifikan dalam mengguritanya para partisipan yang berpartisipasi dalam kegiatan jihad ofensif di Afghanistan atas respon invasi soviet ke negeri para mullah tersebut. Tetapi dalam menganggap menjamurnya para Salafi Jihadis sebagai respon dari Invasi uni Soviet dianggap terlalu dangkal, setidaknya ada beberapa latar belakang runtutan kejadian yang menjadi background yang membayangnya juga antara lain absennya peran Islam dalam lingkup politik

---

<sup>7</sup> <http://www.institut-gouvernance.org/en/analyse/fiche-analyse-37.html>

dan pengaruh budaya barat yang dianggap mendistorsi nilai nilai Islam. Dampak berlansungnya globalisasi aktor dalam hubungan internasional tidak lagi didominasi oleh negara gerakan sosial dalam konteks politik mempunyai tujuan dalam mempromosikan perubahan sosial dan politik. Untuk mengatasi keadaan sosial dan politik, aktor pergerakan sosial dipaksa untuk merubah lingkup operasi mereka yang hanya memiliki jangkauan lokal untuk keluar dari batas nasional suatu negara dan diharapkan dengan meningkatnya pengaruh gerakan sosial tersebut dapat merubah struktur dan sistem kerjanya.

Seorang aktivis memerlukan seperangkat instrumen yang dapat membantunya dalam berkomunikasi, meminimalisir konflik, serta mengatasi perbedaan. Instrumen itu adalah sebuah organisasi transnasional yang dapat memainkan peran kunci dalam level sosial dan politik. Itulah sebabnya gerakan transnasional dikatakan kredibel jika mampu mempengaruhi tindakan sebuah pemerintahan serta memiliki kapasitas dalam memobilisasi masa, kekuatan tawar menawar dalam politik, serta memberikan tekan dan pengaruh terhadap sebuah rezim.<sup>8</sup>

Dalam membangun jaringan transnasional dan menancapkan pengaruhnya para aktor yang saling terhubung, melakukan publikasi dan penyebaran mengenai ideologi, dan aktivitas dimana mereka terlibat melalui media cetak maupun elektronik sebagai dampak dari globalisasi atas meningkatnya volume dan kecepatan mengalirnya barang, dan modal, ide, informasi, dan individu yang

---

<sup>8</sup> Globalization and Transnational Social Movement Organization, Jackie Smith, Department of Sociology, SUNY Stony Brook, Prepared for Conference on "Struggles and Settlements in Organizations and Movements" 10-12 May, 2002, Ann Arbor, Michigan, hal 2

menghubungkan aktor aktor antar negara (Robert Keohane) . Perubahan besar organisasi negara dan masyarakat dapat berdampak substansial pada cara orang memandang perjuangan politik sehingga berkontribusi pada profesionalisasi organisasi gerakan sosial dan melebarkan formasinya untuk mencapai tujuan mereka (cf. Tilly 1984; McCarthy and Zald 1977; Zald 1988).<sup>9</sup> Seiring meningkatnya aktivitas gerakan sosial transnasional, memilii andil dalam meningkatnya aktor organisasi gerakan sosial transnasional yang memiliki peran penting dalam politik global. Disamping itu organisasi gerakan transnasional akan beradaptasi dengan lingkungan sosial dan politik dan lebih terdesentralisasi.

Dalam menggunakan konsep transnational social movement, variabel independen yang akan dibahas adalah tranformasi gerakan salafi jihadis, dalam tahap penjelasan akan dibagi menjadi beberapa penjelasan antara lain :

1.) Penjelasan Individual dan Socio-Psycological

Dalam tema penjelasan ini, dijelaskan mengenai gerakan transnasional yang berpotensi bertransformasi menjadi radikal, yang memperhatikan keadaan personal seorang aktivis yang meliputi ketegangan sosial kultural dalam hubungannya proses radikalisasi serta menjelaskan tentang transformasi identitas dalam dalam proses radikalisasi.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>Ibid hal 3

<sup>10</sup>Thomas Olesen, Social Movement Theory and Radical Islamic Activism, Centre for Studies in Islamism and Radicalisation (CIR) Department of Political Science Aarhus University, Denmark May 2009, hal 10

## 2.) Penjelasan Jaringan dan Organisasi

Dalam tema ini yang akan menjadi fokus penjelasan adalah mengenai jaringan organisasi yang didefinisikan sebagai kendaraan untuk melakukan rekrutmen, penanaman kepaercayaan, dan menggerakkan masa supaya bergabung dan terlibat kegiatan kolektiv tertentu.<sup>11</sup>

## 3.) Penjelasan Struktur dan Lingkungan Politik

Dalam tema ini yang akan mejadi fokus penjelasan adalah berkenaan dengan struktur dan lingkungan politik di sejumlah negara Timur Tengah yang cenderung sentralistik, melekatnya tradisi patriarkal serta absennya keterbukaan bagi warga negaranya untuk berkarya dan mengekspresikan ide dan pendapatnya hal ini memacu gerakan Salafi Jihadis dapat tumbuh dengan subur, serta hubungan gerakan transnasional dengan para aktivisnya serta hubungan gerakan transnasional dengan otoritas pemerintah setempat.<sup>12</sup>

## Teori Konstruktivisme

Dalam menjelaskan fenomena mengenai keterlibatan kelompok Salafi Jihadis dalam kegiatan Politik, penulis menggunakan teori konstruktivisme sebagai kerangka berfikir. Teori Konstruktivisme muncul pada era 1990an yang dimotori oleh Alexander Wendt. Berbeda dengan sejumlah teori lainnya terutama

---

<sup>11</sup>Ibid hal 14

<sup>12</sup> Ibid hal 21

dengan teori rasionalis, konstruktivis menaruh perhatian khusus pada peran norma sosial pada aktor politik.

Menurut Chris Reus Smit konstruktivisme menekankan pada institusionalisasi norma yang membentuk sebuah identitas, serta menjelaskan bagaimana aktor meraih tujuannya secara strategis. Teori konstruktivis merupakan pelengkap sejumlah teori khususnya rasionalisme yang memandang aktor sebagai makhluk yang rasional. Namun tanpa mengabaikan faktor tersebut konstruktivisme menekankan pada peran norma sosial yang menentukan kepentingan serta identitas aktor. Sehingga aktor politik dianggap sebagai makhluk sosial dimana identitas muncul karena institusionalisasi norma, ide, lingkungan sosial dimana mereka berada. Konstruktivisme memandang masyarakat sebagai faktor determinan yang menghasilkan aktor politik sebagai makhluk yang bertindak secara sosial dan agen politik yang membentuk identitas politik mereka.<sup>13</sup>

Dalam membahas fenomena politik internasional teori konstruktivisme memiliki tujuan antara lain yaitu untuk menekankan bahwa selain struktur material ada struktur struktur norma dan ide yang membentuk identitas sebuah aktor politik baik itu berupa *state actor* atau *non state actor*. Konstruktivisme berpendapat bahwa *shared ideas*, kepercayaan, serta nilai memiliki struktur karakteristik yang dapat mempengaruhi tindakan sosial dan politik pada aktor. Sedangkan sumber materil hanya merupakan hasil dari sebuah konsep hubungan antar aktor yang dipengaruhi oleh norma dan ide. Sebagai contoh pada masa

---

<sup>13</sup> Christian Reus-Smit, *Theories of International Relations*, (Palgrave Macmillan 2005), hal 196

perang dunia I, hubungan antara Inggris, Prancis, dan Jerman sempat memanas sebagai akibat dari perlombaan senjata, Inggris tidak menganggap Prancis sebagai musuh karena negara tersebut tergolong sekutu yang *triple entente*, sedangkan Jerman merupakan rival potensial yang berhasil menggabungkan negara-negara kecil menjadi satu dibawah kendali Prusia pada saat itu. Hubungan sekutu Inggris dan Prancis serta rivalitas Inggris, Prancis versus Jerman merupakan hasil dari *sharing ideology and belief*, yang mengarah pada persaingan militer yang merupakan sumber materil.

Identitas sebuah aktor politik muncul dari struktur norma dan ide sebagai hasil dari intitusionalisasi dua struktur tersebut. Sebagai contoh pada masa politik kontemporer pada saat ini konsep *nation state* merupakan konsep negara yang yang diakui sebagai negara yang berdaulat.

Konstruktivis berpendapat bahwa bagaimana kondisi non materil dari identitas aktor politik merupakan hal cukup penting karena identitaslah yang mengatur dan menentukan apa yang akan menjadi hal dan tujuan prioritas dan bagaimana tujuan itu dicapai, serta untuk menjelaskan seberapa besar jangkauan dari fenomena politik penting untuk memahami bagaimana sebuah aktor politik membangun kepentingannya menurut Alexander Wendt identitas merupakan basis dari sebuah kepentingan, itu sebabnya untuk menjelaskan sebuah struktur kepentingan konstruktivisme fokus pada identitas sosial individu dan negara. Negara di Benua Eropa meilih menjadi bagian dari Europa Union dianggap mendapatkan sejumlah keuntungan terutama pada sektor ekonomi melalui integrasi

ekonomi diantara negara anggotanya melalui *free trade barrier*, serta penyatuan mata uang bersama.

Struktur norma dan ide dianggap sebuah faktor yang membantu identitas dan kepentingan dari sebuah aktor melalui mekanisme imajinasi, komunikasi, dan paksaan. Pengimajinasian berdampak pada aktor terhadap apa yang mereka rasakan sebagai sebuah kemungkinan. Mereka akan membayangkan dan memperkirakan bagaimana mereka seharusnya bertindak dan strategi macam apa yang dipilih. Pengaturan norma dan ide berlaku dalam terminologi etik dan praktik.

Selanjutnya melalui komunikasi dimana sebuah aktor akan membentuk sebuah norma yang digunakan sebagai legitimasi sebuah tindakan mereka. Sebagai contoh, tindakan *humanitarian intervension*, yang dilakukan oleh Amerika Serikat pada Somalia dianggap sebagai tindakan legal yang mengacu pada keterancaman hak asasi manusia warga di Somalia oleh rezim yang berkuasa di negara tersebut.

#### **D. Hipotesa**

Peran gerakan salafi dalam menyebarkan ideologi dan membangun fondasi pengaruhnya sehingga muncul gerakan salafi jihadis yang memiliki tujuan menciptakan politik islam yang kuat adalah :

- a.) Mengusung gerakan jihad bersenjata
- b.) Membangun basis gerakan Jihad ofensif di berbagai negara Islam yang dilanda

konflik

c.) Mengembangkan dan menyebarkan pemahaman tentang pentingnya membangun kekuatan politik Islam yang bisa mengayomi umat Muslim di seluruh dunia.

d.) Melakukan strategi desentralisasi guna memperluas jangkauan operasional

### **E.) Tujuan Penelitian**

Dalam tema yang dibahas mengenai transformasi gerakan Salafi Jihadis, penulis memiliki beberapa tujuan dalam memahami gerakan Salafi Jihadis antara lain :

- 1.) Mengetahui tahapan transformasi gerakan Salafi Jihadis
- 2.) Pola dan struktur gerakan Salafi Jihadis
- 3.) Motif Gerakan Salafi Jihadis dalam tujuannya mengimplementasi politik Islam
- 4.) Kondisi sosial politik dikawasan Timur Tengah sebagai kawasan pusat menyebarnya ideologi Salafi yang mengilhami munculnya gerakan Salafi Jihadis.

## **F.) Ruang Lingkup Penelitian**

Untuk membatasi fokus ruang penelitian dan menyesuaikannya dengan tema pembahasan, penulis membatasi ruang lingkup sejak awal munculnya gerakan Salafi Jihadis pada invasi Uni Soviet di Afghanistan pada tahun 1988 hingga saat ini dimana peran gerakan Salafi Jihadis dalam peristiwa Arab Spring. Hal ini berkenaan dengan transformasi gerakan Salafi Jihadis yang dimana awal kemunculannya melabeli bahwa jihad yang dilakukannya sebagai tindakan defensif hingga seiring berjalannya waktu gerakan Salafi mulai melakukan jihad secara ofensif

## **G.) Sistematika Penulisan**

Dalam penyusunan skripsi, penulis membagi kedalam lima bahasan pokok dalam penelitiannya terhadap transformasi gerakan Salafi Jihadis antara lain :

### **1.) Bab Satu (Pendahuluan )**

Pada bab ini penulis mengemukakan tentang latar belakang masalah secara singkat awal munculnya gerakan Salafi hingga munculnya gerakan Salafi Jihadis pada abad ke 20

### **2.) Bab Dua ( Pengertian dan Definisi Gerakan Salafi Secara Umum )**

Pada bab kedua penulis akan menjabarkan definisi gerakan Salafi dan pembagian karakter berbagai gerakan Salafi, serta landasan Teologi yang menjadi fondasi

ideologi para pengikutnya.

### 3.) Bab Tiga (Pemikiran dan Ideologi kelompok Salafi Jihadis)

Bab tiga menjelaskan berbagai macam pendapat dan pemikiran dari sejumlah ulama klasik maupun kontemporer yang berkontribusi membentuk ideologi Gerakan Salafi Jihadis

### 4. Bab Empat ( Dinamika Transformasi Gerakan Salafi Jihadis )

Bab empat menjelaskan tentang dinamika transformasi Gerakan Salafi Jihadis yang berawal dari fase pembentukan dengan munculnya kelompok jihad pada masa perang di Afghanistan melawan invasi Uni Soviet hingga fase Insurgensi pada masa Arab Spring

### 5.) Bab Lima ( Kesimpulan)

Bab lima menarik kesimpulan dari sejumlah tema pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, untuk menyimpulkan bagaimana gerakan Salafi telah bertransformasi dari sebuah gerakan jihad militan menjadi sebuah organisasi yang memiliki ideologi yang dapat memobilisasi berbagai individu dalam menanggapi dan bertindak terhadap isu-isu tertentu.